

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Permasalahan**

Tujuan berdirinya Negara Indonesia seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV adalah (1) Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, (2) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (3) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Seiring dengan dinamika pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat telah menumbuhkan aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Aspirasi dan tuntutan masyarakat itu dilandasi oleh hasrat untuk lebih berperan dalam proses pembangunan yang tengah berlangsung.

Pembangunan merupakan sebuah proses multidimensi yang mencakup perubahan orientasi dan organisasi sistem sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Pembangunan ekonomi adalah usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraannya.

Proses pembangunan ekonomi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan akan dinikmati oleh masyarakat secara merata apabila tiga asumsi dasar terpenuhi, yakni: (1) *full employment* atau partisipasi, artinya semua faktor – faktor produksi dan

pelaku ekonomi ikut serta dalam kegiatan ekonomi; (2) homogenitas, artinya semua pelaku ekonomi memiliki faktor produksi dan mempunyai kesempatan berusaha atau kemampuan menghasilkan yang sama; (3) setiap anggota masyarakat sebagai pelaku ekonomi bertindak rasional; yang menghasilkan, menikmati yang dihasilkan sesuai pengorbanannya (Sumodiningrat, 1999:11)

Ketidaksamaan dalam mendapatkan kesempatan akan menyebabkan timbulnya masalah pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Persoalan kemiskinan merupakan masalah umum yang dihadapi oleh semua Negara berkembang, termasuk Indonesia.

Implikasi dari persoalan tersebut dapat berpengaruh kepada semua aspek kehidupan. Masyarakat menjadi miskin, misalnya bisa jadi karena kekurangan dan keterbatasan ekonomi atau karena ada eksploitasi dan sejenisnya, tetapi mereka yang miskin ini juga bisa jadi karena ketidakberdayaan seluruh aspek kehidupannya, baik ekonomi, sosial politik, dan intelektual.

Dalam menghadapi masalah seperti itu, pemerintah perlu memberi perhatian khusus yang dapat diwujudkan dalam langkah – langkah strategis yang langsung memperluas akses rakyat pada sumber daya pembangunan dan penciptaan peluang yang seluas – luasnya bagi masyarakat dilapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Seperti tertuang dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dimana tujuan Undang – Undang tersebut adalah untuk: (1) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, (2) Menjamin

terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, (3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (4) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (5) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan penentu keberhasilan pembangunan ekonomi, yang ditujukan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan pemerataan yang semakin baik. Pendekatan yang paling tepat dalam pengembangan ekonomi rakyat adalah pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan oleh kelompok masyarakat diharapkan dapat mendorong kemandirian yang berkelanjutan. Dalam hal ini setiap anggota masyarakat disyaratkan berperan serta dalam proses pembangunan, mempunyai kemampuan sama, dan bertindak rasional. Keadaan ini juga berarti bahwa yang menghasilkan harus menikmati hasil pembangunan sesuai dengan yang dihasilkan.

Salah satu program pemberdayaan yang menggunakan pendekatan partisipatif adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). PNPM pertama kali dilaksanakan di Gorontalo pada tahun 1998 dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Kemudian masuk di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2003 dengan nama PNPM-PPK, dan pada tahun 2008 menjadi PNPM Mandiri Perdesaan. Salah satu komponen Program dalam proses

PNPM adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Komponen Bantuan Langsung Masyarakat adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin. Selanjutnya salah satu kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPKP).

Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPKP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan potensi perempuan melalui kelompok usaha bersama. Hal ini adalah untuk meningkatkan status, kedudukan dan peranan bagi perempuan sebagai individu, baik sebagai insan dan sumber daya perempuan sebagai bagian dari keluarga yang merupakan sosok penting dalam menentukan kesejahteraan keluarganya.

Bagi perempuan yang selama ini dianggap kurang mampu yang telah terhimpun dalam wadah kelompok usaha bersama perempuan dirasakan sangat kekurangan modal kerja untuk membangun dan mengembangkan usaha mereka yang tergolong dalam industri kecil berskala rumah tangga. Kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan merupakan salah satu bentuk kelompok usaha bersama yang dilakukan perempuan dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahtraannya.

Bagi perempuan yang terlibat dalam kelompok usaha merupakan peluang besar karena mampu memberikan sumber pendapatan secara teratur. Di samping itu

juga memberikan kesempatan kerja yang sangat besar bagi keterlibatan kaum perempuan karena pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan fisik alamiah kaum perempuan. Selanjutnya dengan pembentukan kelompok memudahkan dalam penyaluran bantuan baik berupa modal berbentuk uang maupun sarana dan prasarana yang diberikan terutama bagi perempuan yang membutuhkan suntikan dana dalam meningkatkan usaha dan pendapatannya.

Manfaat yang diterima masyarakat miskin khususnya kaum perempuan sebagai sasaran program sudah terpenuhi, namun dalam hal pengembangan kelompok untuk menjadi kelompok simpan pinjam yang professional belum maksimal. Dikarenakan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan benar dan kurangnya usaha kelompok untuk memanfaatkan dana yang diberikan oleh pemerintah.

Pelaksanaan program, terutama yang diarahkan pada usaha simpan pinjam kelompok perempuan dilaksanakan berdasarkan tahapan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan sesuai dengan mekanisme PNPM-MP dengan melibatkan masyarakat khususnya perempuan yang tergabung dalam kelompok. Hal ini juga sesuai prinsip PNPM-MP yang mengharuskan adanya keterlibatan perempuan dalam berbagai tahapan kegiatan, dalam proses pengambilan keputusan, serta dalam mengakses dan memonitor penggunaan sumber daya.

Dalam pengamatan awal, kegiatan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan sampai saat ini belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kondisi

jumlah penduduk yang berada di kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango yang berjumlah 10703 jiwa yang tersebar pada 10 desa, memiliki 2838 Kepala Keluarga. Dari jumlah jiwa yang ada, terdapat Masyarakat miskin sebesar 1637 jiwa (KANTOR CAMAT SUWAWA:2009). Hal ini menunjukkan bahwa 15% penduduk di kecamatan Suwawa, masih hidup dalam garis kemiskinan. Dan ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, terutama dari pihak pemerintah selaku pengambil kebijakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan suatu kajian ilmiah melalui penelitian dengan formulasi judul ***“Pengaruh Bantuan Permodalan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango”***.

## **1.2. Identifikasi masalah**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka permasalahan penelitian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan benar.
2. Manfaat yang diterima masyarakat miskin sebagai sasaran program sudah terpenuhi, namun dalam hal pengembangan kelompok untuk menjadi kelompok simpan pinjam yang profesional belum maksimal.
3. Kurangnya usaha kelompok untuk memanfaatkan dana yang diberikan oleh pemerintah.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut “ Apakah terdapat pengaruh pengelolaan bantuan permodalan simpan pinjam kelompok perempuan terhadap keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango?”.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pengelolaan bantuan permodalan simpan pinjam kelompok perempuan terhadap keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan dan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang teori dan konsep tentang bantuan permodalan simpan pinjam kelompok perempuan dan keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berharga bagi pengelola PNPM-MP dalam rangka pengelolaan bantuan permodalan simpan pinjam kelompok perempuan dan keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.